

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi di Indonesia sudah hampir 20 tahun. Hingga kini, regulasi yang menyangkut desentralisasi fiskal tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah (Hadi & Saragih, 2013). Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu instrumen untuk mengoptimalkan layanan publik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari 20 tahun, desentralisasi membuat setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan harapan agar penggunaannya lebih efektif karena dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masyarakatnya.

Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013). Adapun proses pembangunan yang dimaksud hendaknya mencakup segala aspek pembangunan termasuk pembangunan manusia. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan tolak ukur penilaian terhadap pemerataan pembangunan. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia maka penduduk didaerah tersebut

dapat dikatakan semakin baik dalam hal mengakses hasil pembangunan disegi memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan IPM Indonesia untuk tahun 2019 mencapai 71,92 dan berarti sudah memasuki kategori tinggi dan menggambarkan bahwa sebetulnya Indonesia secara keseluruhan sudah memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan masyarakatnya sudah memiliki standar hidup layak. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Angka ini meliputi dari masing-masing indikator IPM itu sendiri. Indikator IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur dengan umur harapan hidup), dimensi pendidikan yaitu pengetahuan (diukur dengan rata-rata lama sekolah), dan dimensi pengeluaran yaitu standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran riil/perkapita). Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2019 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

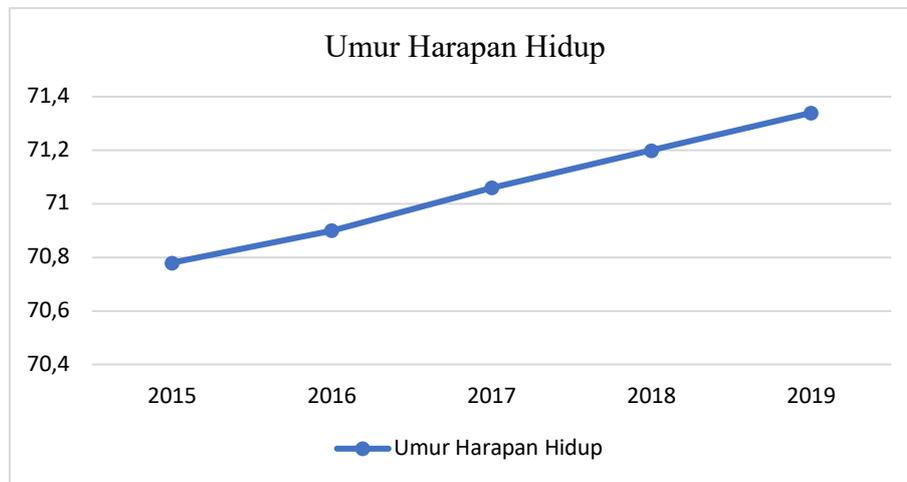
Tabel 1.1 Capaian IPM Indonesia Tahun 2015-2019

No	Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil/perkapita (RibuRupiah/Orang/Tahun)
1	2015	70,78	7,84	10.150
2	2016	70,90	7,95	10.420
3	2017	71,06	8,10	10.664
4	2018	71,20	8,17	11.059
5	2019	71,34	8,34	11.299

Sumber : BPS, data diolah 2021.

Pertama, dimensi Kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2018-2019 meningkat dari 71,2 tahun menjadi 71,34 tahun. Bayi yang lahir pada 2019 memiliki harapan dapat hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan yang lahir pada tahun sebelumnya. Selanjutnya apabila digambarkan dalam bentuk grafik dimensi Kesehatan dapat dilihat dalam grafik umur harapan hidup tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

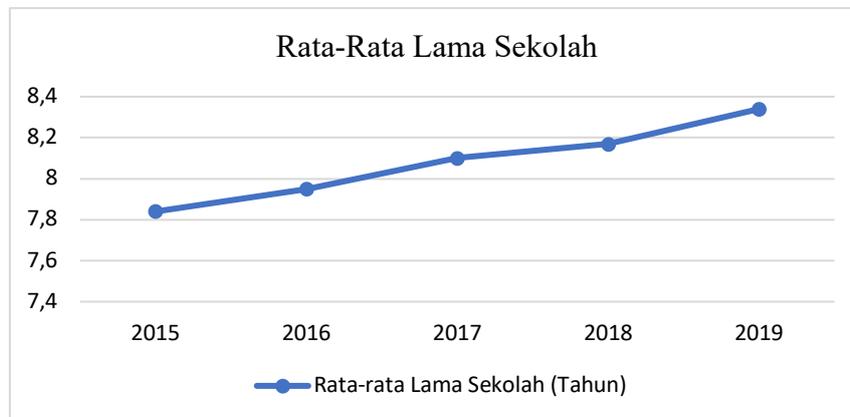
Grafik 1.1 Umur Harapan Hidup Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, data diolah 2021.

Kedua, dimensi Pendidikan yaitu pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah yang juga mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018-2019 dimensi Pendidikan yang naik dari 8,17 tahun menjadi 8,34 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,25 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2019. Pada 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia umur 25 tahun ke atas mencapai 8,34 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas IX. Hal ini tentu saja menjadi hal baik karena semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula harapan bahwa masyarakat memiliki akses Pendidikan yang baik sehingga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri karena dapat membantu memenuhi standar yang lain yaitu standar hidup layak karena dapat mengakses pendapatan dengan Pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya apabila telah memiliki Pendidikan dan standar hidup layak yang baik, maka masyarakat akan hidup lebih sehat karena mereka telah mengetahui langkah dan jenis pengobatan seperti apa yang harus mereka ambil ketika mengalami suatu penyakit. Dimensi pendidikan menjadi sangat penting karena memiliki pengaruh yang cukup erat terhadap dua dimensi lain dalam IPM. Apabila digambarkan dalam grafik sejak tahun 2015-2019 dimensi Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

Grafik 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, data diolah 2021.

Ketiga, tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita yang juga meningkat dari Rp11,05 juta per tahun menjadi Rp11,29 juta per tahun. Tingkat pendapatan tersebut sangat menentukan IPM. Pasalnya, bisa mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Apabila hal tersebut baik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara itu sendiri. Adapun dalam grafik digambarkan sebagai berikut:

Grafik 1.3 Pengeluaran Perkapita Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, data diolah 2021.

Angka IPM Indonesia yang berada di rentang 70-80 termasuk tinggi. Apabila ditinjau secara keseluruhan, indikator IPM Indonesia menyandang status tinggi karena berada diangka 71,92. Namun apabila dilihat lebih jauh per provinsi masih ada perbedaan yang cukup nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 23 provinsi di Tanah Air yang menyandang status IPM tinggi. Sisanya yaitu 11

provinsi menyanggah status IPM sedang karena skornya berada di rentang 60-70. Setiap IPM provinsi dan kategorinya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Urutan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	IPM	Kategori
1	DKI Jakarta	80,76	Sangat Tinggi
2	D I Yogyakarta	79,99	Tinggi
3	Kalimantan Timur	76,61	Tinggi
4	Kepulauan Riau	75,48	Tinggi
5	Bali	75,38	Tinggi
6	Riau	73,00	Tinggi
7	Sulawesi Utara	72,99	Tinggi
8	Banten	72,44	Tinggi
9	Sumatera Barat	72,39	Tinggi
10	Jawa Barat	72,03	Tinggi
11	Aceh	71,90	Tinggi
12	Sumatera Utara	71,74	Tinggi
13	Jawa Tengah	71,73	Tinggi
14	Sulawesi Selatan	71,66	Tinggi
15	Jawa Timur	71,50	Tinggi
16	Kepulauan Bangka Belitung	71,30	Tinggi
17	Jambi	71,26	Tinggi
18	Bengkulu	71,21	Tinggi
19	Sulawesi Tengah	71,20	Tinggi
20	Kalimantan Utara	71,15	Tinggi
21	Kalimantan Tengah	70,91	Tinggi
22	Kalimantan Selatan	70,72	Tinggi
23	Sumatera Selatan	70,02	Tinggi
24	Lampung	69,57	Sedang
25	Sulawesi Tengah	69,50	Sedang
26	Maluku	69,45	Sedang
27	Maluku Utara	68,70	Sedang
28	Gorontalo	68,49	Sedang
29	Nusa Tenggara Barat	68,14	Sedang
30	Kalimantan Barat	67,65	Sedang
31	Sulawesi Barat	65,73	Sedang
32	Nusa Tenggara Timur	65,23	Sedang
33	Papua Barat	64,70	Sedang
34	Papua	60,84	Sedang

Sumber : BPS, data diolah 2021.

Data di atas mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakmerataan kebijakan yang diberlakukan di masing-masing daerah karena seharusnya

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus lah bermanfaat bagi setiap masyarakatnya dengan cara mempermudah mereka untuk mengakses setiap dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Layak. Selain itu, alokasi belanja modal yang baik juga akan sangat mempengaruhi kelayakan hidup semua masyarakat karena seyogyanya belanja modal diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang mana nantinya akan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam rangka mengakses pendapatan.

Di sisi lain, dalam melaksanakan sebuah pembangunan, investasi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendukung proses pembangunan, mengingat Indonesia memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi lahan investasi. Ada dua jenis investasi yaitu investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi swasta tersebut dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi menjadi penting karena adanya investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja terserap karena banyaknya peluang lapangan pekerjaan yang terbuka. Selanjutnya hal ini tentu saja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Indonesia yang juga meningkat dari Rp11,05 juta per tahun menjadi Rp11,29 juta per tahun pada tahun 2018 ke 2019. Tingkat pendapatan tersebut sangat menentukan IPM. Pasalnya, bisa mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat, yang selanjutnya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses kehidupan yang layak terutama ditiga dimensi utama yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak.

Oleh karena hal yang sudah dinyatakan di atas, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga variabel sehingga dapat meningkatkan serta pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, BELANJA MODAL, DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
2. Apakah Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah Investasi Swasta secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.3. Ruang Lingkup

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan serta analisis yang terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini, peneliti membatasi jangka waktu yang dibahas yaitu data yang digunakan adalah data 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 – 2019.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Swasta secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Untuk mengetahui Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan terutama pemahaman tentang pemerintah daerah khususnya Indeks Pembangunan Manusia.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah ada.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial, dan juga dapat memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pembangunan pada pemerintah.